



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Administrasi Publik Program Sarjana

Terakreditasi Unggul

SK BAN-PT No. 3765/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/VI/2022

**Akuntabilitas Pegawai Publik Pada Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bekasi**

Skripsi

Oleh

Kania Anggraeny Ramadhan

6071801107

Bandung

2022



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Administrasi Publik Program Sarjana

Terakreditasi Unggul

SK BAN-PT No. 3765/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/VI/2022

**Akuntabilitas Pegawai Publik Pada Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bekasi**

Skripsi

Oleh

Kania Anggraeny Ramadhan

6071801107

Pembimbing

Kristian Widya Wicaksono, Ph.D.

Bandung

2022



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Administrasi Publik Program Sarjana

Terakreditasi Unggul

SK BAN-PT No. 3765/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/VI/2022

***Public Employee Accountability at Department of
Population Control and Family Planning Bekasi District***

Skripsi

Oleh

Kania Anggraeny Ramadhan

6071801107

Bandung

2022



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Administrasi Publik Program Sarjana

Terakreditasi Unggul

SK BAN-PT No. 3765/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/VI/2022

***Public Employee Accountability at Department of
Population Control and Family Planning Bekasi District***

Skripsi

Oleh

Kania Anggraeny Ramadhan

6071801107

Pembimbing

Kristian Widya Wicaksono, Ph.D.

Bandung

2022

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Administrasi Publik
Program Studi Administrasi Publik Program Sarjana



Tanda Pengesahan Skripsi

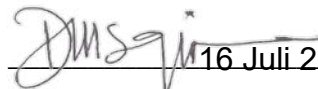
Nama : Kania Anggraeny Ramadhan
Nomor Pokok : 6071801107
Judul : Akuntabilitas Pegawai Publik Pada Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bekasi

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Jumat, 8 Juli 2022
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji


Ketua sidang merangkap anggota

Dr. Ulber Silalahi, Drs., M.A.

:  16 Juli 2022


Sekretaris

Kristian Widya Wicaksono, S.Sos. M.Si.

:  16 Juli 2022

Anggota

Tutik Rachmawati, Ph.D

:  16 Juli 2022

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kania Anggraeny Ramadhan
NPM : 6071801107
Jurusan/Program Studi : Sarjana Administrasi Publik
Judul : Akuntabilitas Pegawai Publik Pada Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Bekasi

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apa pun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui pernyataan ini tidak benar.

Bandung, Juni 2022



Kania Anggraeny Ramadhan

Akuntabilitas Pegawai Publik Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bekasi

ORIGINALITY REPORT

32%

SIMILARITY INDEX

31%

INTERNET SOURCES

17%

PUBLICATIONS

15%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	ecampus.pelitabangsa.ac.id Internet Source	4%
2	docplayer.info Internet Source	1%
3	core.ac.uk Internet Source	1%
4	www.tandfonline.com Internet Source	1%
5	sgmendung.wordpress.com Internet Source	1%
6	jwk.bandung.lan.go.id Internet Source	1%
7	Submitted to Catholic University of Parahyangan Student Paper	1%
8	123dok.com Internet Source	1%

eprints.undip.ac.id

ABSTRAK

Nama : Kania Anggraeny Ramadhan
Nomor Pokok : 6071801107
Judul : Akuntabilitas Pegawai Publik Pada Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bekasi

Judul penelitian ini adalah Akuntabilitas Pegawai Publik Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Bekasi. Berdasarkan hasil studi pendahuluan dengan menggunakan metode wawancara diketahui bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) di DPPKB Kabupaten Bekasi kurang saling memperhatikan dalam pelaksanaan pekerjaan dan masyarakat Kabupaten Bekasi tidak bisa memantau kinerja ASN DPPKB Kabupaten Bekasi.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan akuntabilitas pegawai publik atau Aparatur Sipil Negara (ASN) di DPPKB Kabupaten Bekasi. Teori yang dipergunakan untuk mendeskripsikan akuntabilitas pegawai pada DPPKB Kabupaten Bekasi adalah *Public Employee Accountability* yang dikembangkan oleh Han dan Perry yang terdiri dari lima dimensi yaitu: *attributability*, *observability*, *evaluability*, *answerability*, dan *consequentiality*. Teori ini menitik beratkan pengungkapan akuntabilitas dari sisi pegawai yang bersangkutan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan jenisnya adalah non-eksperimental atau yang sering kali disebut sebagai survei. Tipe pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada seluruh pegawai di DPPKB Kabupaten Bekasi. Dengan kata lain, teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel jenuh yaitu sebanyak 40 responden yang selanjutnya dianalisis menggunakan *Statistical Package for Social Science (SPSS)*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 55% responden menyatakan setuju bahwa ASN di lingkungan DPPKB Kabupaten Bekasi sudah mampu menunjukkan akuntabilitas sebagai pegawai publik dalam menjalankan pekerjaannya. Namun, sebagian responden lainnya hanya menyatakan cukup setuju bahwa ASN di lingkungan DPPKB Kabupaten Bekasi sudah mampu menunjukkan akuntabilitas sebagai pegawai publik dalam menjalankan pekerjaannya. Hal ini dikarenakan belum seluruh ASN di lingkungan DPPKB Kabupaten Bekasi menjalankan pekerjaan mereka berdasarkan prosedur dan kebijakan organisasi.

Kata kunci: Akuntabilitas, Akuntabilitas Pegawai Publik, dan Observabilitas

ABSTRACT

Name : Kania Anggraeny Ramadhan
NPM : 6071801107
Title : *Public Employee Accountability at Department of Population Control and Family Planning Bekasi District*

The title of this research is Public Employee Accountability at Department of Population Control and Family Planning (DPPKB) Bekasi District. Based on the results of a preliminary studies using the interview method, be discovered that the State Civil Apparatus (ASN) in DPPKB Bekasi District didn't pay attention to each other in implementing their work and the Bekasi district community can't observe the performance of ASN DPPKB Bekasi Regency.

This study aims to describe the public employee accountability or State Civil Apparatus (ASN) in DPPKB Bekasi Regency. The theory used to describe employee accountability at DPPKB Bekasi Regency is Public Employee Accountability developed by Han and Perry which consists of five dimensions, namely: attributability, observability, evaluability, answerability, and consequentialilty. This theory focuses on accountability from the employee's perspective.

This research uses a quantitative approach and the type is non-experimental or usually referred as a survey. This type of data collection is decimating by distributing questioner to all employees at DPPKB Bekasi District.. In other words, the sampling technique used in this research is saturated sample of 40 respondents which was further analyzed using the Statistical Package for Social Science (SPSS).

The results of this research indicate that 55% respondents agreed that ASN in the DPPKB Bekasi District was able to demonstrate accountability as public employees in implementing their work. However, some other respondents quite agreed that ASN in DPPKB Bekasi District was able to demonstrate public employee accountability in their work. Because, not all ASN in the DPPKB Bekasi District environment implementing their work based on organizational procedures and policies.

Keywords: Accountability, Public Employees Accountability, Observability

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhanahuwata'ala sebab atas limpahan rahmat-Nya, penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul: **Akuntabilitas Pegawai Publik Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bekasi**. Skripsi ini disusun sebagai memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Sarjana Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari hambatan dan kesulitan, namun berkat adanya bimbingan, nasihat dan dukungan dari berbagai pihak maka pada akhirnya skripsi ini bisa disajikan bagi dewan pembaca. Dalam pembuatan Skripsi ini peneliti mendapatkan banyak bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Keluarga tercinta, Ayahanda Ronny dan Ibunda Henny yang telah memberikan dukungan dalam segala hal untuk tercapainya penulisan ini sampai selesai;
2. Dosen Pembimbing, Bapak Kristian Widya Wicaksono, Ph.D.;
3. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Bapak Dr. Pius Sugeng Prasetyo;
4. Ketua Jurusan Administrasi Publik, Ibu Indraswari., Ph.D.;
5. Ketua Program Studi Sarjana Administrasi Publik, Bapak Trisno Sakti Herwanto, S.IP. MPA.;
6. Seluruh Dosen pada Program Studi Sarjana Administrasi Publik;
7. Teman-teman yang Bersama-sama menjalani proses bimbingan skripsi yaitu Thesalonica, Deva, Fadlin, Shifa, Dilla dan Dea; dan
8. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang mana telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna. Maka dari itu, dengan besar hati penulis akan menerima kritik dan saran dari berbagai pihak agar skripsi ini dapat menjadi lebih baik lagi. Sebagai penutup kata pengantar ini penulis hendak menyampaikan ucapan terima kasih untuk dewan pembaca semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat.

Bandung, Juni 2022

Penyusun

Kania Anggraeny Ramadhan

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
<i>ABSTRACT</i>	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I <u>P</u> ENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB II <u>K</u> AJIAN PUSTAKA.....	8
2.1 Akuntabilitas.....	8
2.2 Akuntabilitas Publik.....	11
2.4 Akuntabilitas Pegawai Publik.....	14
2.5 Kerangka Berpikir.....	19
BAB III <u>M</u> ETODE PENELITIAN	20
3.1 Rancangan Penelitian.....	20
3.2 Populasi dan Sampel	21
3.2.1 Populasi	21
3.2.2 Sampel.....	21
3.3 Pengukuran dan Instrumen Penelitian.....	21
3.3.1 Skala Pengukuran dan Teknik Penskalaan	21
3.3.2 Operasional Variabel	22
3.3.3 Uji Reliabilitas	25

3.3.4 Uji Validitas	26
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	27
3.4.1 Kuesioner.....	27
3.4.2 Wawancara.....	27
3.5 Analisis Data.....	28
BAB IV _PROFIL DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BEKASI.....	29
4.1 Lokasi Penelitian.....	29
4.2 Visi dan Misi.....	29
4.3 Kewenangan	29
4.5 Struktur Organisasi	31
BAB V _INTERPRETASI DATA	32
5.1 Karakteristik Responden	32
5.1.1 Jenis Kelamin.....	32
5.1.2 Jenis Kelamin.....	322
5.1.3 Pendidikan Terakhir	34
5.1.4 Lama Bekerja.....	35
5.2 Dimensi-Dimensi Akuntabilitas Pegawai Publik di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	35
5.2.1 Attributability.....	36
5.2.2 Observability.....	38
5.2.3 Evaluability.....	40
5.2.4 Answerability.....	42
5.2.5 Consequentiality	44
BAB VI _KESIMPULAN DAN SARAN	48
6.1 Kesimpulan.....	48
6.2 Saran.....	49

DAFTAR PUSTAKA.....	50
LAMPIRAN	52

DAFTAR TABEL

TABEL 3.1 Skala Likert	22
TABEL 3.2 Operasional Variabel	23
TABEL 3.3 Instrument ukuran dari <i>Cronbach</i>	25
TABEL 3.4 Hasil Uji Reliabilitas.....	26
TABEL 3. 5 Hasil Uji Validitas	27
TABEL 5.1 Distribusi Frekuensi <i>Attibutability</i>	36
TABEL 5.2 Indeks Interval <i>Attibutability</i>	37
TABEL 5.3 Distribusi Frekuensi <i>Observability</i>	37
TABEL 5.4 Indeks Interval <i>Observability</i>	38
TABEL 5.5 Distribusi Frekuensi <i>Evaluability</i>	39
TABEL 5.6 Indeks Interval <i>Evaluability</i>	40
TABEL 5.7 Distribusi Frekuensi <i>Answerability</i>	42
TABEL 5.8 Indeks Interval <i>Answerability</i>	43
TABEL 5.9 Distribusi Frekuensi <i>Consequentiality</i>	45
TABEL 5.10 Indeks Interval <i>Consequentiality</i>	45
TABEL 5.11 Kelas Interval Akuntabilitas Pegawai Publik.....	46
TABEL 5.12 Distribusi Frekuensi Akuntabilitas Pegawai Publik di DPPKB Kabupaten Bekasi	45

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 2.1 Kerangka Berpikir	18
GAMBAR 5.1 Jenis Kelamin Responden.....	31
GAMBAR 5.2 Usia Responden.....	32
GAMBAR 5.3 Pendidikan Terakhir Responden	33
GAMBAR 5.4 Lama Bekerja.....	34

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntabilitas merupakan suatu perilaku untuk bertanggungjawab. Salleh dan Iqbal dalam Raba (2006, 1) menjelaskan bahwa *“the root word of accountability is ‘account’ which suggest that work is not oneself but is also responsibility to other.”* Maka, akuntabilitas menjadi bentuk tanggung jawab yang tidak terbatas untuk diri sendiri tetapi tanggung jawab terhadap pihak-pihak yang lain. Oleh karenanya, memiliki rasa tanggung jawab menjadi hal yang penting.

Istilah akuntabilitas dalam pelayanan publik dapat menunjukkan seberapa besar tanggung jawab penyelenggara pelayanan dalam melakukan tindakan. Akuntabilitas pelayanan publik menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap organisasi publik. Adapun tanggapan mengenai akuntabilitas pelayanan publik menurut Jabra dan Dwivedi dalam Wirijadinata (2007, 1-2) mengemukakan:

“Public service accountability involves the methods by which a public agency or public official fullfills its duties and obligations, and the process by which that agency or the public official is required to account for such actions”

Berdasarkan dari uraian tersebut, akuntabilitas pelayanan publik menjadi metode yang digunakan pegawai publik dalam memenuhi kewajibannya serta keharusan yang harus dijalankan. Akuntabilitas pelayanan publik dapat menjadi strategi awal untuk menjaga kepatuhan terhadap standar yang telah diterbitkan agar tidak terjadinya penyelewengan wewenang maupun perbuatan. Dengan demikian, pegawai publik harus memiliki rasa tanggung jawab dalam menjalankan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh organisasinya.

Selanjutnya Jabra dan Dwivedi dalam Wirijadinata (2007) menyarankan adanya mekanisme kontrol pada akuntabilitas pelayanan publik baik internal maupun eksternal. Pada kontrol akuntabilitas pelayanan publik internal dapat dilakukan dengan pengawasan terhadap etika pelayanannya seperti pada sikap kepemimpinan dan

keteladanan dalam pelaksanaan kode etik pelayanan. Dan pada kontrol akuntabilitas pelayanan publik eksternal dapat dilakukan melalui survei dan kelompok kepentingan yang berperan lebih dalam kebijakan publik. Dengan demikian, akuntabilitas dapat menjadi suatu pencegahan penyalahgunaan kewenangan dan menjadikan kekuasaan yang dimiliki oleh pegawai publik dapat menciptakan pencapaian tujuan.

Oleh karena itu, dalam pelayanan publik memerlukan pegawai publik yang dapat mempertanggungjawabkan pekerjaannya. Akuntabilitas dapat menjadi suatu standar yang harus dilaksanakan oleh pegawai publik guna memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dengan ini, akuntabilitas dapat digunakan sebagai alat untuk menilai kualitas kinerja pegawai publik dengan mengetahui kekuatan dan kelemahan (Maani 2009, 54)

Perkembangan mengenai konsep akuntabilitas sudah diteliti oleh beberapa peneliti namun, penelitian mengenai akuntabilitas pegawai publik atau *public employee accountability* masih belum berkembang. Faktanya, para pegawai publik harus memiliki kesadaran untuk bertanggungjawab atas segala tindakan dan perbuatan yang dilakukan harus sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh masing-masing organisasi maupun dalam Undang-Undang. Dengan belum adanya pembahasan secara spesifik mengenai *public employee accountability* peneliti Han dan Perry (2019) sebagai peneliti pertama yang membahas akuntabilitas pegawai sektor publik di Amerika Serikat. Mereka mengemukakan untuk sektor publik, bahwa pegawai publik harus memiliki sikap tanggung jawab dan juga organisasi publik harus mendorong istilah akuntabilitas seperti adanya *feedback*, sanksi, laporan, evaluasi kinerja dan aturan yang eksplisit guna menegakkan akuntabilitas.

Dalam perkembangan penelitian administrasi publik menurut Romzek dan Dubnick dalam Han dan Perry (2019, 2) lebih menekankan akuntabilitas publik berfokus pada sarana pegawai publik dalam mengelola macam-macam harapan yang ingin dihasilkan di dalam maupun di luar organisasi yang mana lebih dari sebuah jawaban atau *feedback* untuk pegawai publik. Penelitian administrasi publik selama ini kurang

memberikan konsep mengenai konsep akuntabilitas yang dirasakan secara individual dan pertama kali dikemukakan dalam psikologi sosial.

Selanjutnya menurut Tetlock dalam Han dan Perry (2019, 3) mengatakan bahwa pandangan yang dianggap baik untuk mengonseptualisasikan akuntabilitas individu melalui model kontigensi sosial. Dalam model kontigensi sosial ini menyampaikan tiga konsep akuntabilitas. Pertama, akuntabilitas individu yang melibatkan akuntabilitas itu sendiri tidak patuh pada evaluasi sistem akuntabilitas makro. Kedua, akuntabilitas individu sebagai pengalaman subjektif yang bermaksud akuntabilitas merupakan hasil dari internalisasi aturan dan harapan dari pihak eksternal. Ketiga, akuntabilitas individu yang dapat diubah seperti halnya pada kepribadian. Dengan ini, dapat dikatakan jika terjadi perubahan dalam praktiknya dapat mengurangi akuntabilitas individu.

Dalam penelitian Han dan Perry (2019) menggunakan definisi akuntabilitas pegawai berdasarkan perspektif Lerner dan Tetlock mengenai akuntabilitas individu. Mereka mengartikan akuntabilitas pegawai adalah

“Employee accountability is the expectation that one may be called on to explain an action or inaction to salient audience(s) with the belief of a consequence based on evaluation.”

Dalam uraian tersebut mengemukakan bahwa akuntabilitas pegawai bentuk dari harapan bahwa seseorang dapat menjelaskan suatu tindakan kepada pihak lain dengan keyakinan akan konsekuensi melalui evaluasi yang dimiliki.

Pada penelitian sebelumnya seperti pada penelitian Koppell (2005) menetapkan lima dimensi hasil akuntabilitas di tingkat makro. Selanjutnya pada penelitian Radin (2011) yang menerapkan multidimensi untuk mempelajari akuntabilitas sektor publik. Dalam penelitian Han dan Perry (2019) terdapat lima dimensi akuntabilitas pegawai publik yaitu *attributability*, *observability*, *evaluability*, *answerability*, dan *consequentiality*. Penelitian ini mengembangkan konsep akuntabilitas pegawai untuk digunakan pada organisasi sektor publik. Dalam lima dimensi tersebut didapatkan dalam

penelitian eksperimental yang memanipulasi dimensi fokus agar subjek merasa bertanggungjawab. Secara konseptualnya lima dimensi tersebut berbeda tetapi saling terkait satu sama lainnya untuk akuntabilitas pegawai.

Namun, pada praktiknya masih sering mendapati organisasi publik yang tidak mencerminkan akuntabilitas. Salah satunya pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bekasi (DPPKB Kabupaten Bekasi) yang kurang optimal dalam praktik akuntabilitas pada sektor publik. Berdasarkan dari hasil wawancara kepada salah satu pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bekasi sebagai berikut: *“dalam melakukan program keluarga berencana salah satunya yang dilakukan door to door masih kurang optimal terkait metode penyampaian komunikasinya antara kita jadi saat melakukan penyuluhan dengan warga susah untuk dimengerti dan ditambah ada covid-19 yang menghambat penyuluhan dalam keberlangsungan program.”*¹ Berdasarkan hasil wawancara yang bertujuan untuk menegaskan masalah terkait kurang optimalnya praktik akuntabilitas pada pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bekasi dikarenakan kurang memperhatikan pekerjaan satu sama lainnya serta kurang konsisten dalam melakukan keberlangsungan program. Permasalahan ini termasuk dalam dimensi *attributability* dikarenakan Kurangnya tingkat ekspektasi akuntabilitas dari masing-masing individu pegawai serta kurang merasakan saling keterkaitan satu sama lainnya untuk melakukan keberlangsungan program.

Permasalahan selanjutnya adalah minimnya pengetahuan mengenai laporan kinerja pegawai untuk pihak eksternal mengetahui apakah pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bekasi sudah optimal. Hal tersebut terungkap pada hasil wawancara sebagai berikut: *“untuk*

¹ Wawancara dengan pegawai DPPKB Kabupaten Bekasi perempuan usia 28 tahun pada tanggal 10 Juni 2022 Pukul 12.30

laporan kinerjanya ada sih didraft nanti saya coba tanyakan ke yang lain ya untuk hasil laporannya."² Berdasarkan hasil wawancara yang bertujuan untuk menegaskan masalah terkait minimnya observasi yang tidak dapat dilakukan oleh pihak untuk mengetahui mengenai kinerja yang telah dilakukan oleh DPPKB Kabupaten Bekasi. Permasalahan ini termasuk dalam dimensi *observability* dikarenakan tidak transparan mengenai kinerja pegawai dengan ini pihak eksternal tidak dapat melakukan observasi kepada pegawai.

Oleh karena itu, dalam konteks akuntabilitas seharusnya DPPKB Kabupaten Bekasi sebagai organisasi publik harus akuntabel dalam permasalahan tersebut. DPPKB Kabupaten Bekasi seharusnya mampu mengoptimalkan program Keluarga Berencana untuk menekan angka kelahiran dan penambahan penduduk di Kabupaten Bekasi yang semakin meningkat. Dengan demikian, untuk menciptakan pemerintahan yang akuntabel pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bekasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bekasi No. 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bekasi. Dalam kewenangannya pada pasal 2 menjelaskan mengenai penyelenggaraan pada dinas dalam menyelenggarakan segala urusan pemerintahan di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Dan telah ditetapkan kewenangan untuk pengendalian penduduk, penyelenggaraan keluarga berencana serta pembinaan dan peningkatan keluarga sejahtera (Peraturan Bupati Bekasi No. 70 Tahun 2016). Dengan demikian, sesuai dengan maksud dari akuntabilitas yang mana suatu instansi pemerintah telah menetapkan kewenangan, tujuan, dan fungsi yang jelas agar dapat mempertanggungjawabkan pada pencapaian hasil sesuai yang ditetapkan.

Pada penelitian ini menggunakan teori yang dikemukakan oleh Han dan Perry (2019) yang dilakukan di Amerika. Teori ini digunakan karena sesuai untuk mengetahui

² Wawancara dengan pegawai DPPKB Kabupaten Bekasi perempuan usia 28 tahun pada tanggal 10 Juni 2022 Pukul 12.30

bagaimana sikap individu pegawai publik di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bekasi dalam menjalankan tugas-tugasnya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, penelitian ini merupakan penelitian menggunakan teori Han dan Perry dengan menggunakan lima dimensi akuntabilitas yaitu *attributability, observability, evaluability, answerability, and consequentially*.

Melalui penelitian ini, akan mengetahui nilai akuntabilitas pegawai publik di Indonesia dengan menggunakan lima dimensi akuntabilitas dari Han dan Perry (2019). Dengan adanya penelitian mengenai akuntabilitas pegawai publik dengan objek pegawai di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bekasi yang menjadikan penelitian baru ini dapat menjadi acuan untuk pegawai-pegawai publik memiliki nilai akuntabilitas dalam menjalankan tugas-tugasnya sesuai dengan peraturan dalam organisasi publik.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas peneliti kemudian tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai akuntabilitas pegawai publik. Oleh karena itu, topik penelitian ini adalah **“Akuntabilitas Pegawai Publik Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bekasi”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti bermaksud untuk merumuskan permasalahan penelitian yaitu:

Bagaimanakah akuntabilitas pegawai publik pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bekasi berdasarkan pada dimensi *attributability, observability, evaluability, answerability, dan consequentially*?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan akuntabilitas pada pegawai publik di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bekasi berdasarkan dimensi *attributability, observability, evaluability, answerability, dan consequentially*.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pimpinan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bekasi dalam akuntabilitas pegawai publik. Oleh karenanya, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bekasi harus memperhatikan dan mempertahankan akuntabilitas pegawainya dalam melaksanakan pekerjaannya.

1.4.2 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan membantu mengembangkan penelitian akuntabilitas pegawai publik dan menjadi wawasan tambahan peneliti yang ingin melanjutkan penelitian ini.